



**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**SELASA, 01 OKTOBER 2019**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERISAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Mantan Dewan Janji Siap Kembalikan TGR**

**KOTA MANNA** - Mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) periode 2004 - 2009 serta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), dapat peringatan dari Unit Tipikor Sat Reskrim Polres BS. Apa itu?

Diingatkan agar segera kembalikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang jadi temuan BPK RI. Jika tidak dikembalikan dalam waktu dekat, pihak Unit Tipikor Sat Reskrim Mapolres BS akan mengusut perkara tersebut.

"Khusus untuk PUPR diingatkan segera bayar TGR. Kalau mantan anggota dewan yakni Tedy Mirzal berjanji akan mengembalikan TGR itu awal bulan Oktober ini. Proses hukum bakal dijalankan kalau yang bersangkutan abaikan peringatan ini," tegas Kapolres BS, AKBP. Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Reskrim, AKP. Rahmat Hadi Fitrianto, SH, S.IK disampaikan Kanit Tipikor, Ipda. Sukamto.

Sukamto menjelaskan total TGR mantan dewan yang belum dibayarkan mencapai Rp 19 juta. Bahkan lebih besar lagi, adalah

Dinas PUPR mencapai Rp 1 miliar lebih. Padahal, waktu yang diberikan supaya kembalian TGR sudah cukup lama. Tetapi sampai kini diabaikan.

Karena itu penyidik Unit Tipikor akan cari dokumennya terkait hal itu untuk melakukan penyelidikan. "Penanda tangan kontrak yang akan bertanggung jawab terhadap TGR. Kini kami mencari siapa yang menandatangani TGR itu," ujar Sukamto.

Sampai kemarin (30/9), Unit Tipikor Polres BS berhasil menyelamatkan uang negara dari penagihan TGR temuan BPK RI sebesar Rp 79 juta lebih. Uang itu, semua bersumber dari TGR mantan anggota dewan yang berjumlah Rp 167.114.613.

Selain Tedy Mirzal, pihak PUPR masih ada 2 anggota dewan yang belum mengembalikan TGR tersebut. Pasalnya yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Jadi Unit Tipikor, segera koordinasi sama Inspektorat BS. Apakah TGR itu bisa dihapus atau tidak. "Nanti kita koordinasikan dulu dengan Inspektorat dan BPK untuk proses selanjutnya," demikian Sukamto. **(tek)**